

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika pengambilan keputusan pemerintah Kanada dalam menghentikan program Student Direct Stream (SDS) pada periode 2018–2024, dengan menggunakan kerangka teori *Rational Policy Model* yang dikemukakan oleh Graham T. Allison. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya, penelitian ini menyimpulkan bahwa penghentian program SDS secara total pada 8 November 2024 bukanlah sebuah kegagalan implementasi kebijakan imigrasi, melainkan sebuah strategi pemaksimalan nilai (*value-maximizing*) yang sangat rasional dari pemerintah federal Kanada. Negara secara sadar mengorbankan keuntungan komersial jangka pendek dari sektor ekspor pendidikan tinggi demi menyelamatkan stabilitas infrastruktur perumahan domestik dan mengamankan integritas keamanan kedaulatan di tengah eskalasi konflik domestik dan geopolitik. Keempat komponen dalam paradigma Allison memberikan instrumen analitis yang sistematis untuk membongkar pergeseran rasio biaya dan manfaat (*cost-benefit*) di balik siklus hidup program ini.

Pertama, dalam dimensi *Policy as National Choice* dan *Organizing Concepts*, penelitian ini menemukan bahwa pembentukan SDS pada tahun 2018 berawal sebagai keputusan mutlak yang menguntungkan untuk merespons krisis demografis, kekurangan tenaga kerja terampil, dan inefisiensi birokrasi di perbatasan akibat asimetri informasi. Kanada secara efektif mengkapitalisasi mahasiswa internasional, khususnya yang berasal dari India, dengan mewajibkan

prasyarat kemampuan bahasa (skor IELTS 6.0) dan kepemilikan *Guaranteed Investment Certificate* (GIC) sebesar CAD 10.000 guna menyaring kandidat secara cepat dan transparan. Pada fase ekspansinya, keputusan ini sangat berhasil secara ekonomi; menyumbangkan CAD 30,9 miliar terhadap PDB nasional pada tahun 2022 dan menopang lebih dari 218.000 lapangan pekerjaan domestik. Tingginya angka kedatangan pada tahun 2022 didorong oleh kebijakan pemerintah federal yang melakukan akselerasi pemrosesan aplikasi pasca pandemi serta pelonggaran batas jam kerja bagi mahasiswa internasional untuk secara langsung menambal kekosongan absolut di pasar tenaga kerja lokal. Namun, kepentingan dan strategi ini semua berubah sejak banyaknya mahasiswa internasional di Kanada yang mengundang banyak permasalahan dan ketidaksiapan Kanada dalam menerima mahasiswa internasional dengan jumlah sebanyak itu.

Kedua, dalam dimensi *Dominant Inference Pattern*, tindakan kebijakan ekspansif yang awalnya optimal tersebut secara fundamental berubah menjadi liabilitas struktural akibat kegagalan pemerintah federal dan institusi pendidikan provinsi dalam menyelaraskan rekrutmen masif dengan perencanaan kapasitas infrastruktur yang riil. Volume hiperaktif populasi mahasiswa internasional menciptakan beban ekstrem pada pasar hunian sewa swasta. Tingkat kekosongan unit apartemen (*vacancy rates*) anjlok hingga menyentuh titik kritis 1,8 persen, memaksa 90 persen rumah tangga mahasiswa asing terjebak dalam kemiskinan struktur hunian. Realitas empiris ini secara organik memicu hantaman balik pada tahun 2023. Masalah-masalah itu mengalir ke kesejahteraan sosial masyarakat Kanada dari masalah perumahan, lapangan pekerjaan, serta ketidakstabilan politik di domestik.

Ketiga, dalam dimensi *General Propositions* dan *Specific Propositions*, pergeseran kalkulasi rasional Kanada memuncak ketika krisis kapasitas domestik berbenturan langsung dengan krisis geopolitik internasional. Tudingan terbuka Perdana Menteri Justin Trudeau atas keterlibatan agen intelijen pemerintah India dalam pembunuhan aktivis pro-Khalistan, Hardeep Singh Nijjar, pada pertengahan 2023 memicu aksi saling balas yang berujung pada penarikan paksa 41 diplomat Kanada dari New Delhi. Kehilangan personel konsuler secara masif ini melumpuhkan kapasitas operasional Immigration, Refugees, and Citizenship Canada (IRCC) di wilayah sumber pelamar terbesarnya. Masalah domestik dari krisis perumahan, kesejahteraan sosial, hingga meningkatnya popularitas partai oposisi membuat khawatir pemerintah Kanada.

Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa penghentian program SDS harus dinilai melalui lensa hierarki kepentingan nasional yang utuh. Faksi keamanan-federal berhasil memenangkan perdebatan struktural melawan faksi ekonomi-provinsial dengan bertindak tegas merespons fakta lapangan. Arsitektur dominasi ekonomi melalui diplomasi pendidikan dihentikan karena rasio kerugiannya telah melampaui ambang batas rasional: keberlanjutan program SDS pada akhirnya tidak lagi berfungsi sebagai penopang ekonomi, melainkan sebagai ancaman logistik dan geopolitik yang merusak kedaulatan perbatasan dan stabilitas tatanan perumahan internal Kanada.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dari dinamika kebijakan imigrasi pendidikan Kanada dan penghentian program Student Direct Stream (SDS), penelitian ini merumuskan beberapa saran strategis yang ditujukan bagi pembuat kebijakan serta

rekomendasi bagi peneliti selanjutnya. Harapannya, saran-saran ini dapat memberikan manfaat baik bagi kalangan akademisi maupun para pembuat kebijakan yang relevan.

Bagi pembuat kebijakan, permasalahan tentang integrasi kebijakan imigrasi dengan perencanaan infrastruktur domestik merupakan hal yang krusial. Pemerintah Kanada dan pemerintah provinsi harus menyelaraskan target kuota imigrasi pendidikan dengan kapasitas daya dukung infrastruktur lokal, khususnya perumahan. Kesenjangan yang tajam antara kebijakan rekrutmen internasional yang ekspansif dan kebijakan perumahan yang stagnan harus diakhiri agar mahasiswa internasional tidak rentan terhadap eksploitasi.

Universitas dan *community college* di Kanada harus mengurangi ketergantungan ekstrem pada biaya kuliah diferensial mahasiswa internasional yang selama ini digunakan sebagai instrumen untuk menutupi defisit pemotongan dana publik provinsi. Model pendanaan yang mengkomodifikasi mahasiswa internasional ini terbukti tidak berkelanjutan dan menciptakan kerentanan institusional yang fatal terhadap guncangan geopolitik dan diplomasi.

Pemerintah Kanada perlu mengubah paradigma pendidikan internasionalnya dari sekadar kebijakan yang berorientasi pada keuntungan ekonomi, menjadi pendekatan *engaged soft power*. Hal ini menuntut Kanada untuk tidak lagi melihat negara-negara berkembang seperti India, Filipina, Malaysia, dll hanya sebagai sumber pendapatan dan pipa tenaga kerja, melainkan membangun kemitraan pertukaran pendidikan yang resiprokal dan saling menguntungkan dalam era geopolitik baru.

Bagi peneliti selanjutnya, mengingat penelitian ini menggunakan unit analisis negara sebagai aktor rasional tunggal, peneliti selanjutnya dalam studi Hubungan Internasional dapat memperdalam analisis menggunakan Bureaucratic Politics Model. Pendekatan tersebut dapat digunakan untuk membedah secara spesifik proses tawar-menawar politik internal antara faksi provinsial melawan faksi federal dalam proses perumusan penutupan program keimigrasian.

Adapun hal tentang perluasan variabel negara asal, dimana penelitian ini sangat didominasi oleh variabel sengketa diplomatik bilateral Kanada-India pasca kasus Hardeep Singh Nijjar. Peneliti selanjutnya disarankan untuk mengkaji dampak penghentian program jalur cepat seperti SDS terhadap tren mobilitas mahasiswa dari negara-negara prioritas lainnya seperti Tiongkok, Filipina, Vietnam ataupun negara francophone. Hal ini penting untuk menguji apakah kontraksi pasar pendidikan Kanada terjadi murni akibat regulasi domestiknya atau seberapa jauh hal tersebut dipengaruhi secara spesifik oleh sentimen kebijakan luar negeri negara asal.

